

TRANSFORMASI SISTEM AKUNTANSI PUBLIK DAN TANTANGAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Natasya Putri Wardani¹, Ratna Anggraini Aripriatiwi²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. Ahmad Yani No.117, Surabaya

natsyaptrr@gmail.com¹, ratna.anggraini@uinsa.ac.id²

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas reformasi tersebut terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan fokus pada sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal. Melalui metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa jurnal, regulasi, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK periode 2019–2023. Landasan teori reformasi akuntansi publik dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi pijakan utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual mampu meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara signifikan, dari 62% pada 2019 menjadi lebih dari 84% pada 2023. Namun, terdapat disparitas antarwilayah, di mana daerah maju seperti Jawa mencapai 95% WTP, sementara Papua-Maluku hanya 65%, dipengaruhi keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, dan komitmen pimpinan daerah. Reformasi ini juga terbukti memperkuat sistem pengendalian internal dengan menurunnya jumlah kasus ketidakpatuhan dan kerugian negara, meskipun tantangan berupa kelemahan auditor internal dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi masih terjadi.

Kata kunci: Reformasi; Akuntansi; Sektor Publik; Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Akuntabilitas

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of the reform on the quality of local government financial reporting, focusing on the extent to which the implementation of the accrual-based Government Accounting Standards (SAP) strengthens transparency, accountability, and internal control systems. Using a qualitative research method, data were collected through literature studies, including journals, regulations, and Audit Reports (LHP) of the Audit Board of Indonesia (BPK) from 2019 to 2023. The theoretical foundation of public accounting reform and accrual-based SAP serves as the main analytical framework. The findings reveal that the implementation of accrual-based SAP has significantly increased the number of Unqualified Opinions (WTP), from 62% in 2019 to more than 84% in 2023. However, regional disparities remain, as developed regions such as Java reached 95% WTP, while Papua-Maluku only achieved 65%, influenced by limitations in human resources, technological infrastructure, and leadership commitment. The reform has also strengthened internal control systems, evidenced by the declining number of non-compliance cases and state financial losses, although challenges such as weak internal auditors and suboptimal use of technology persist.

Keywords: Reform; Accounting; Public Sector; Government Accounting Standards (SAP); Accountability.

PENDAHULUAN

Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan *good governance*, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Risnainingsih, 2016). Pasca reformasi 1998, pemerintah mendorong berbagai perubahan fundamental melalui landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Vania Talitha, 2021). Peraturan-peraturan ini menjadi pijakan dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik (Rohman et al., 2023).

Salah satu titik penting reformasi adalah transisi standar akuntansi dari basis kas (*cash basis*) menuju basis akrual (*accrual basis*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mulai berlaku penuh sejak 2015 (Eka Amelia et al., 2024). Penerapan basis akrual diyakini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, akurat, dan relevan mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat.

Namun, meskipun reformasi telah berjalan lebih dari satu dekade, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2019–2023, terlihat adanya tren peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dari 62% pada 2019 menjadi 84,3% pada 2023 (Kristiani et al., 2024). Meski demikian, BPK masih menemukan kelemahan signifikan, antara lain 4.467 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) senilai Rp 27,23 triliun pada 2022 dan 4.123 kasus senilai Rp 24,87 triliun pada 2023. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan masih terjadi, dengan 1.089 kasus pada 2023 yang menimbulkan potensi kerugian negara Rp 2,98 triliun (Kristiani et al., 2024).

Disparitas kualitas pelaporan juga menjadi persoalan yang cukup menonjol. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa 95% pemerintah daerah di Jawa berhasil memperoleh opini WTP, sementara di Papua dan Maluku hanya 65%. Perbedaan ini menggambarkan adanya kesenjangan kapasitas

kelembagaan, infrastruktur, serta dukungan sumber daya manusia antar wilayah. Survei Kementerian Dalam Negeri (2022) mendukung temuan ini, di mana 43% pemerintah daerah dilaporkan kekurangan tenaga akuntansi yang berkualifikasi, 67% masih membutuhkan pelatihan SAP berbasis akrual, dan 38% belum memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai (Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2023).

Faktor infrastruktur teknologi juga memengaruhi efektivitas implementasi, tercermin dari data BPS (2023) yang menunjukkan disparitas akses internet: 89% kabupaten/kota di Jawa memiliki jaringan stabil, sementara Papua hanya 56% (Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2023). Selain itu, ukuran transparansi fiskal juga masih menunjukkan variasi yang signifikan. Indeks Transparansi Fiskal Daerah tahun 2023 berada pada angka rata-rata nasional 65,4 (kategori sedang), dengan DKI Jakarta mencapai skor tertinggi 88,7 dan Papua Tengah terendah 34,2 (Amal et al., 2024). Meski jumlah komplain masyarakat terhadap transparansi keuangan daerah menurun dari 2.341 kasus pada 2021 menjadi 1.654 kasus pada 2023, penurunan ini belum cukup untuk menggambarkan perbaikan kualitas pelaporan yang merata di seluruh daerah (Amal et al., 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara normatif, reformasi akuntansi publik dirancang untuk

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, disparitas teknologi, serta komitmen daerah (Arifin et al., 2024).

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teknis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sementara kajian mengenai dampak komprehensif reformasi terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan faktor kontekstual masih terbatas (Wahyudi, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan evaluasi yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas reformasi akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Azifi & Marliyah, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan tujuan menggali secara mendalam dampak reformasi akuntansi sektor publik terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan memotret angka-angka statistik, tetapi juga berusaha

memahami makna, konteks, serta dinamika penerapan reformasi akuntansi yang telah berjalan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi analisis jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta laporan resmi pemerintah seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK periode 2019–2023 (Wahyudi, 2019).

Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran kondisi faktual implementasi SAP di berbagai daerah. Misalnya, pada tahun 2023 terdapat 457 LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkat dari 336 LKPD pada 2019, namun BPK masih menemukan 4.123 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan nilai Rp 24,87 triliun, yang menunjukkan adanya celah implementasi di lapangan (Eka Amelia et al., 2024). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, *display* data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Harahap, 2023).

Pada tahap reduksi data, informasi relevan seperti disparitas opini WTP antar wilayah atau faktor penghambat implementasi SAP dipilih secara selektif (Assyakurrohim et al., 2022). Data yang telah diringkaskan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar keterkaitan antar faktor dapat tergambar jelas, sebelum akhirnya diverifikasi dengan regulasi dan praktik

empiris di lapangan untuk menghasilkan pemahaman yang valid mengenai dampak reformasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Melalui Transisi Basis Akuntansi

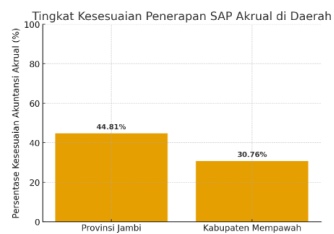
Reformasi akuntansi sektor publik melalui penerapan SAP berbasis akrual telah menunjukkan hasil yang signifikan secara nasional, realitas di lapangan memperlihatkan adanya disparitas kualitas pelaporan keuangan antar daerah (Lestari & Maharani, 2025). Tidak semua pemerintah daerah dapat mengimplementasikan standar akuntansi berbasis akrual secara optimal. Perbedaan kemampuan ini umumnya dipengaruhi oleh faktor kapasitas sumber daya manusia (SDM), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta komitmen pimpinan daerah dalam mendorong transparansi keuangan (Amal et al., 2024).



Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik telah

membawa kemajuan signifikan, tercermin dari capaian 496 LKPD atau 91% memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2022. Namun, hingga 2023 masih terdapat sekitar 15,7% LKPD yang belum meraih opini WTP, sebagian besar berasal dari daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) profesional di bidang akuntansi pemerintahan. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, seperti provinsi dan kota besar, relatif lebih mampu memenuhi tuntutan reformasi karena memiliki dukungan anggaran, teknologi, serta tenaga akuntan yang memadai (Imran, 2012).

Meskipun secara nasional capaian WTP cukup tinggi, kedalaman penerapan akuntansi berbasis akrual di tingkat daerah masih jauh dari optimal. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penerapan akrual di Provinsi Jambi hanya sebesar 44,81%, bahkan lebih rendah lagi di Kabupaten Mempawah yakni 30,76%. Data ini mengindikasikan bahwa opini WTP bukan jaminan bahwa akuntansi akrual telah diterapkan secara substansial, melainkan sering kali baru sebatas kepatuhan administratif (Rosyidah et al., 2023).



Fenomena disparitas ini

menegaskan bahwa reformasi akuntansi sektor publik tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural. Kualitas pelaporan keuangan tidak sekadar cerminan dari kepatuhan terhadap regulasi, melainkan hasil dari sinergi kapasitas kelembagaan, infrastruktur teknologi informasi, dan budaya akuntabilitas yang berkembang di suatu daerah (Rosyidah et al., 2023). Misalnya, daerah yang memiliki kultur birokrasi transparan cenderung lebih cepat beradaptasi dengan sistem akrual, sementara daerah dengan kultur patrimonial atau resistensi terhadap perubahan akan lebih lambat.

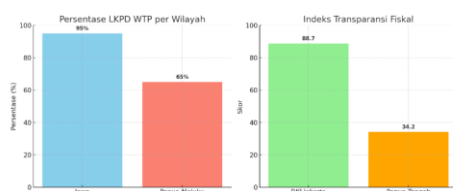
Ketidakmerataan ini juga berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Daerah dengan laporan keuangan yang akuntabel mampu mengalokasikan anggaran secara efektif untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan Pendidikan (Wisnu Haryo Prakoso et al., 2022). Sebaliknya, daerah dengan kualitas pelaporan rendah lebih rentan terhadap salah kelola, penyalahgunaan keuangan, serta menurunnya kepercayaan publik.

Oleh karena itu, meskipun reformasi akuntansi sektor publik menunjukkan tren positif, keberlanjutan perbaikan masih membutuhkan strategi afirmatif yang menyesuaikan kondisi spesifik tiap daerah, baik melalui peningkatan kapasitas SDM,

penguatan sistem pengawasan, maupun dukungan teknologi informasi yang terintegrasi (Arifin et al., 2024).

Disparitas Regional Dalam Implementasi Reformasi Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas regional yang cukup signifikan dalam implementasi reformasi akuntansi di Indonesia. Wilayah maju, khususnya Jawa, mampu mencapai tingkat kualitas laporan keuangan yang lebih baik dengan 95% LKPD memperoleh opini WTP serta mencatat indeks transparansi fiskal tertinggi, seperti yang terlihat di DKI Jakarta dengan skor 88,7 (Amir et al., 2023). Sebaliknya, wilayah berkembang seperti Papua-Maluku hanya mencatat 65% LKPD beropini WTP, bahkan Papua Tengah berada pada posisi terendah dengan indeks transparansi sebesar 34,2. Kesenjangan ini juga diperkuat oleh faktor infrastruktur, di mana 89% kabupaten/kota di Jawa telah memiliki koneksi internet stabil, sementara di Papua hanya sekitar 56% (Amir et al., 2023).



Disparitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor mendasar. Sekitar 43% pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan tenaga akuntansi yang berkualifikasi, 67% membutuhkan pelatihan intensif mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual, dan 38% belum memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai (Vezalin et al., 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan, kebebasan tersebut juga menimbulkan kesenjangan antarwilayah dalam keberhasilan reformasi akuntansi (Risnarningsih, 2016).

Analisis mendalam mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas implementasi. Daerah dengan akses pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, seperti di Jawa, terbukti lebih berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi juga menjadi elemen kritis, karena daerah yang memiliki koneksi internet stabil dan sistem informasi keuangan memadai lebih mudah melaksanakan reformasi akuntansi (Syarienda et al., 2019). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen pimpinan daerah, di mana kepemimpinan yang kuat dan konsisten terbukti berhubungan langsung dengan peningkatan opini audit yang lebih baik.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa strategi pendampingan implementasi reformasi akuntansi tidak dapat disamaratakan. Diperlukan pendekatan diferensiasi yang menyesuaikan dengan kapasitas dan kondisi masing-masing daerah. Investasi infrastruktur teknologi informasi di wilayah tertinggal menjadi langkah prioritas agar kesenjangan tidak semakin melebar (I Gusti & Putu Eka, 2020). Selain itu, program *capacity building* yang lebih intensif perlu digalakkan, terutama bagi daerah yang masih memiliki tingkat keberhasilan rendah, sehingga tujuan besar reformasi akuntansi berupa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia (Syarienda et al., 2019).

Efektivitas Reformasi Dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal

Efektivitas reformasi akuntansi sektor publik dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dapat terlihat dari berbagai capaian positif dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan adanya perbaikan nyata, seperti penurunan kasus ketidakpatuhan dari 1.157 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.089 kasus pada 2023, serta pengurangan nilai kerugian negara/daerah dari Rp 3,45 triliun menjadi Rp 2,98 triliun pada periode yang sama (I Gusti & Putu Eka, 2020). Selain itu, rata-rata Indeks Transparansi Fiskal Daerah juga meningkat hingga mencapai angka 65,4

yang masuk dalam kategori sedang. Reformasi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal secara menyeluruh (Chudri et al., 2023). Daerah yang telah menerapkan sistem informasi terintegrasi tercatat memiliki 23% lebih sedikit temuan kelemahan SPI, sementara penerapan *e-budgeting* dan *e-procurement* mampu menekan temuan ketidakpatuhan hingga 18% (Chudri et al., 2023).

Implementasi SAP berbasis akrual terbukti meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan keuangan. Sistem akuntansi yang lebih komprehensif memungkinkan identifikasi risiko dilakukan lebih cepat dan akurat, sehingga memperkecil peluang terjadinya kerugian. Integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan juga memperkuat mekanisme *check and balance* yang lebih efektif di pemerintah daerah (Mujennah et al., 2022). Hal ini pada akhirnya mendorong terbentuknya budaya akuntabilitas yang semakin kuat, tercermin dari tren penurunan konsisten dalam jumlah temuan audit maupun nilai kerugian negara/daerah.

Namun demikian, efektivitas reformasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan kompetensi auditor

internal di sebagian besar pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam penguatan pengendalian internal. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi belum optimal, sementara standarisasi sistem pengendalian internal yang lebih komprehensif masih perlu dikembangkan (Setyawan et al., 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis yang berkelanjutan, antara lain penguatan kapasitas auditor internal melalui program sertifikasi, penerapan sistem pengendalian internal berbasis teknologi dengan pendekatan *Governance, Risk, and Compliance (GRC)*, serta pengembangan indikator kinerja pengendalian internal yang terukur dan dapat dibandingkan antar daerah (Akbar, 2019). Dengan langkah tersebut, reformasi akuntansi sektor publik tidak hanya akan menghasilkan laporan yang lebih transparan, tetapi juga menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas.

SIMPULAN

Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi antar wilayah. Keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, dan komitmen pimpinan daerah. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi disparitas regional dan memperkuat sistem pengendalian internal secara menyeluruh.

Untuk memperkuat capaian tersebut, diperlukan penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi teknologi berbasis *Governance, Risk, and Compliance (GRC)*, serta pengembangan indikator kinerja pengendalian internal yang terukur dan kompetitif antar wilayah. Dengan dukungan SDM yang unggul, teknologi yang mumpuni, dan kepemimpinan visioner, akuntabilitas serta integritas pengelolaan keuangan publik di Indonesia akan semakin kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. G. (2019). The Impact of a Procurement Implementation and Government Internal Control System on Goods/Services Procurement Fraud Prevention by Using Organization Ethical Culture as a Moderating Variable. *Jurnal Economia*, 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23618>
- Amal, M. I., Nurfaliza, N., & Wokas, H. R. N. (2024). Implementation of Accrual Basis Accounting in the Public Sector in Indonesia: A Literature Review. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), 361–376. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/eajmr/article/view/7943>
- Amir, A., Rahayu, S., & Hizazi, A. (2023). Transformation of Human Resources to Improve

- the Performance of SIPKD Mediated by the Implementation of Accrual-Based SAP in Jambi Province Regional Equipment Organizations. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(3), 1633–1649.
- Arifin, B., Abrori, M., & Masrurroh, D. (2024). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Bondowoso. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 43–53. <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
- Assyakurroh, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan. *Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 5(5), 729–736. <file:///C:/Users/asus/Downloads/JISMA+Vol1+No5+Hal+729-736+250.pdf>
- Chudri, I. R., Yusuf, Y., & Gemara, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Efektifitas Penerapan SAP Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKD Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–6.
- Eka Amelia, Haliah Haliah, & Andi Kusumawati. (2024). Analysis of the Implementation of Accrual-Based Government Accounting and its Implications for the Quality of Financial Reports in the Public Sector. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(4), 392–409. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v2i4.2437>
- Erwinton Putra Antonius Tarigan, L. N. (2023). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, 18(1), 29.
- Harahap, S. S. (2023). Perilaku Memberikan Saweran kepada Qori atau Qori'ah yang Sedang Melantunkan Ayat Al-Qur'an (Studi terhadap Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 204 dalam Perspektif M. Quraish Shihab). *Anwarul*, 3(6), 1323–1339. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1697>
- I Gusti, & Putu Eka. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 137–147.
- Imran, A. N. (2012). Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pemanfaatan Potensi Ekowisata Bagi Pengembangan Ekowisata di Kawah Cibuni. *Journal of Regional and City Planning*, 23(2), 85. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2012.23.2.1>
- Kristiani, G. M., Fadillah, R., Sahrul, S., & Anggraeni, S. A. (2024). Challenges of Government Accounting Policy

- Reform in Indonesia. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*, 2(1), 7–10. <https://doi.org/10.26905/j-tragos.v2i1.11442>
- Lestari, I. D., & Maharani, L. (2025). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap Transparansi Keuangan: Studi Kasus Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Akademik*, 2(1), 7–9. <https://jurnalpustakacendekia.com/index.php/jca/article/view/406>
- Mujennah, M., Safriansyah, S., Firdaus, I., & Fatimah, S. (2022). Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. *Owner*, 6(3), 3065–3076. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006>
- Risnarningsih. (2016). Implementasi Dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 8. <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.49>
- Ritonga, I. T. (2018). Analysing the quality of accrual accounting implementation in indonesia local governments. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 162. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.345>
- Rohman, A., Sunarti, & Kustiwi, I. (2023). Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kinerja Layanan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 347–355. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- ROSYIDAH, U. F., ZUNIATIN, H., & ROHMA, F. F. (2023). Upaya Sinkronisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Program Magang Industri Guna Mendorong Efisiensi Kinerja. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 36–41. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i2.642>
- Setyawan, W., Rika Gamayuni, R., & Muhammad Ahmad, S. (2019). Analysis The Effect of e-Budgeting and Government Internal Control System on The Quality of Financial Reporting of Local Government in Indonesia in Islamic Perspectives. *Ikonomika*, 4(2), 137–150. <https://doi.org/10.24042/febi.v4i2.5204>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syarienda, Y., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 56–68. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10923>
- Vania Talitha, K. A. (2021). Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Indonesia: A Review of Organizational Factors. *Journal of Economics and Behavioral Studies (ISSN: 2655-1306)*, 3(5), 6.
- Vezalin, F., Sartika, D., & Ilyas, A. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Kasus

Pada BPKAD Kota Padang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 165–177.
<https://databoks.katadata.co.id/datapubli>

Wahyudi, I. (2019). Indonesian Treasury Review Analisis Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua. *Indonesian Treasury Review*, 4(1), 13–22.

Wisnu Haryo Prakoso, I Gusti Ketut Agung Ulupui, & Petrolis Nusa Perdana. (2022). Analisis Perbandingan Model Taffler, Springate, dan Grover Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(1), 1–15.
<https://doi.org/10.21009/japa.0301.01>